

RILIS

PELUNCURAN PETA KEMISKINAN DAN PENGHIDUPAN INDONESIA 2015

Tantangan bagi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia saat ini diarahkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yaitu menurunkan angka kemiskinan menjadi 7-8 persen pada tahun 2019. Selain itu, Indonesia juga termasuk negara yang menyepakati target-target baru pembangunan dunia untuk dicapai pada 2030, yang dituangkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dari 17 target pembangunan dalam SDGs, kemiskinan menjadi isu pertama dan menargetkan pengurangan segala bentuk dan dimensi kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrim pada tahun 2030.

Agenda nasional terkait arah dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia tersebut masih menghadapi tantangan yang berat. Dalam 16 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stagnan di sekitar angka 5.0 persen. Meskipun pertumbuhan ekonomi tersebut telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 19.1 persen pada tahun 2000 menjadi 10.9 persen pada 2016, laju penurunan kemiskinan terus melambat. Pada 2008-2009 angka kemiskinan menurun sebesar 8 persen, namun pada 2015-2016 hanya menurun sekitar 3 persen. Jika tren ini terus berlanjut, target pencapaian angka kemiskinan dalam RPJM tidak akan tercapai. Dalam dua tahun terakhir, jumlah penduduk miskin hanya berkurang sekitar 500 ribu per tahunnya; sedangkan untuk mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN setidaknya akan diperlukan penurunan penduduk miskin sebesar 2 juta jiwa per tahun.

Oleh karena itu, dalam Rapat Paripurna Kabinet Kerja yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2017 di Istana Negara, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan sembilan poin arahan terkait pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018; yang salah satunya adalah perlunya memfokuskan pagu indikatif RAPBN 2018 untuk mencapai target-target pembangunan, khususnya untuk menurunkan kemiskinan menjadi *single digit*. Walaupun demikian, akan sulit bagi Pemerintah untuk hanya mengandalkan anggaran pembangunannya untuk mengurangi kemiskinan secara signifikan. Berbagai program perlindungan sosial dalam bentuk Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar hanya akan membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk mendapat akses pangan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin, diperlukan keterpaduan bantuan dan program dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga-lembaga nonpemerintah yang makin lama makin berperan penting dalam meningkatkan pendapatan penduduk miskin.

Salah satu prasyarat penting bagi keterpaduan upaya penanggulangan kemiskinan adalah ketersediaan data kemiskinan dalam berbagai dimensi, moneter dan nonmoneter, yang akurat dan mudah diakses oleh berbagai pelaku pembangunan. Dalam rangka meningkatkan ketersediaan data, Pemerintah telah membangun Basis Data Terpadu (BDT) yang berisi data 40 persen penduduk termiskin, lengkap dengan nama dan alamat tempat tinggalnya; dan merupakan basis data yang dapat digunakan untuk menetapkan target secara perorangan. Dalam banyak hal, juga diperlukan data-data kemiskinan di tingkat daerah untuk menetapkan target geografis (lokasi) suatu program; khususnya data yang menyediakan informasi sampai tingkat administrasi terkecil (desa/kelurahan) dan mencakup berbagai dimensi kemiskinan.

Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia 2015

Dalam rangka mendukung ketersediaan data kemiskinan multidimensi hingga tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, the SMERU Research Institute – dengan dukungan The Ford Foundation - terus menerus mengembangkan peta kemiskinan dan penghidupan yang dapat diakses masyarakat umum. Upaya ini diawali dengan penyusunan estimasi angka kemiskinan wilayah kecil berdasarkan standar garis kemiskinan nasional (GKN)¹ dengan memanfaatkan data Sensus Penduduk (SP) tahun 2000, Potensi Desa (Podes) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Pada 2005, untuk pertamakalinya SMERU mempublikasikan estimasi angka kemiskinan di semua kecamatan dan desa/kelurahan di Indonesia, yang merepresentasikan kondisi pada tahun 2000.

Ketika data SP 2010 tersedia, SMERU dengan dukungan The Ford Foundation dan UNICEF, melakukan pembaharuan dan menambahkan angka kemiskinan umum dan kemiskinan anak berdasarkan standar garis kemiskinan internasional, US\$2 *purchasing power parity*² serta menambahkan berbagai indikator lain terkait kondisi penghidupan masyarakat. Pada 2015, SMERU kembali meluncurkan peta kemiskinan dan penghidupan yang disajikan dalam bentuk peta dan data yang dapat diakses melalui situs www.indonesiapovertymap.org; dan hingga April 2016 telah diakses oleh lebih 400 pengguna. Lebih dari separuh pengguna peta ini adalah dari kalangan pemerintah, akademisi dan lembaga penelitian; dengan jenis penggunaan yang beragam, mulai dari bahan penulisan sampai alokasi anggaran.

Dalam perkembangannya, kondisi kemiskinan yang terus berubah menuntut adanya pembaruan data agar terus sesuai dengan perkembangan sosial-ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, meskipun pembaharuan estimasi angka kemiskinan semestinya baru dapat dilakukan setelah ada data Sensus Penduduk yang baru, SMERU–kembali dengan dukungan The Ford Foundation– mencoba menggunakan tehnik estimasi yang memungkinkan dilakukannya pembaruan data kemiskinan agar dapat merepresentasikan kondisi pada 2015, serta menyempurnakan kedua peta kemiskinan terdahulu dengan menyajikan tampilan peta yang lebih dinamis dan interaktif.

Pada hari ini SMERU meluncurkan Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia 2015 yang memuat estimasi angka kemiskinan untuk semua desa/kelurahan di Indonesia (lebih dari 75.000 desa/kelurahan).

¹ Garis Kemiskinan Nasional yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik

² *Purchasing power parity* atau paritas daya beli adalah metode yang digunakan untuk menghitung nilai relatif mata uang terhadap mata uang negara lain, misalnya dalam hal ini, rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Selain estimasi angka kemiskinan, peta ini juga dilengkapi dengan angka ketimpangan (rasio gini), kondisi infrastruktur, serta indikator-indikator sosial ekonomi lainnya, sehingga kondisi kemiskinan suatu wilayah dapat dilihat secara lebih komprehensif. Salah satu fitur baru Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia 2015 ini adalah informasi kualitatif 50 desa yang tersebar di berbagai provinsi. Informasi kualitatif tersebut mencakup sejarah desa, jenis pekerjaan, topografi, dan akses terhadap infrastruktur. Diharapkan informasi kualitatif desa ini akan terus dikembangkan dengan menghimpun kontribusi dari berbagai pihak, sehingga peta kemiskinan dan penghidupan dapat menjadi sumber informasi yang dinamis dan interaktif.

Hasil estimasi angka kemiskinan 2015 per desa/kelurahan memperlihatkan bahwa sekitar 58 persen desa/kelurahan memiliki angka kemiskinan di atas angka kemiskinan nasional (11,22 persen pada 2015). Pola yang sama terjadi di hampir semua daerah, kecuali di Kalimantan. Persentase desa/kelurahan dengan angka kemiskinan yang lebih tinggi dari angka nasional paling banyak berada di Maluku-Papua (81 persen), diikuti oleh Bali-Nusa Tenggara (77 persen), sedangkan yang paling sedikit adalah di Kalimantan (22 persen). Ada sekitar 2,5 persen desa/kelurahan di Indonesia memiliki angka kemiskinan lebih dari 50 persen, dan sebagian besar berada di Maluku-Papua; di wilayah Maluku-Papua ini sekitar 26 persen desa memiliki angka kemiskinan lebih dari 50 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan kondisi pada 2010, proporsi desa/kelurahan yang angka kemiskinannya lebih tinggi dari angka nasional hanya meningkat sedikit dari 53,6 persen ke 57,8 persen. Pola ini terjadi di semua wilayah, kecuali di Kalimantan yang proporsi desa dengan angka kemiskinan lebih dari angka nasional cenderung menurun.

Peta kemiskinan yang diluncurkan ini memiliki beragam peran dan manfaat. Peta ini menyajikan data proporsi penduduk miskin dan keragaman tingkat kesejahteraan penduduk antarwilayah hingga tingkat administratif terkeci. Peta ini juga dapat digunakan untuk baseline/basis data untuk evaluasi dampak program dan kebijakan, memperbaiki penargetan dan penggunaan sumberdaya secara lebih efektif dan efisien, dan meningkatkan transparansi dan kredibilitas pengambilan keputusan terkait penargetan kemiskinan, baik oleh pemerintah maupun lembaga nonpemerintah terkait. Keterbukaan data kemiskinan dalam berbagai dimensi ini juga diharapkan dapat memfasilitasi keterpaduan dan sinergi upaya berbagai pihak dalam mengurangi kemiskinan. Data-data dalam peta ini juga dapat digunakan sebagai bahan analisis dan penelitian untuk kalangan akademisi dan mahasiswa, sehingga akan makin meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian-penelitian tentang kemiskinan dalam berbagai dimensi.

Kontak:

Mayang Rizky/081218296758/mrizky@smeru.or.id
Ratri Indah Septiana/08161361514/rseptiana@smeru.or.id